



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS TANJUNGPURA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EVA DOLOROSA
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK
3. NHK : 551038

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 12.871.692.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 720 m2/133 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.841.779.000
2. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 1.047.814.000
3. Tanah Seluas 101 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 521.766.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 709 m2/240 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 3.860.214.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 378 m2/243 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.075.382.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 431 m2/125 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.126.764.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 127 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
8. Tanah Seluas 15278 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 712.973.000
9. Tanah Seluas 541 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 75.000.000**



1. MOBIL, FORD WAGON Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
75.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 226.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.739.048.756

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 15.911.740.756

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 15.911.740.756

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.